



## **Resiliensi UMKM Halal Dalam Liberalisasi Ekonomi**

**M. Zarkasi Rohim<sup>1</sup>, Rodiatul Mafila<sup>2</sup>, Muhammad Fakhri Jazilar Rohman<sup>3</sup>, Dewi Faikhotul Tohiro<sup>4</sup>, Dicky Aryansyah<sup>5</sup>**

<sup>1</sup> Ekonomi Syari'ah, Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Ekonomi Syari'ah, Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember<sup>2</sup>, Ekonomi Syari'ah, Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember<sup>3</sup>, Ekonomi Syari'ah, Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember<sup>4</sup>, Ekonomi Syari'ah, Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember<sup>5</sup>

<sup>1</sup>[zarkasyirhm23@gmail.com](mailto:zarkasyirhm23@gmail.com), <sup>2</sup>[rodima2911@gmail.com](mailto:rodima2911@gmail.com), <sup>3</sup>[faqihjazilarrohman@gmail.com](mailto:faqihjazilarrohman@gmail.com), <sup>4</sup>[dewiithohiro@gmail.com](mailto:dewiithohiro@gmail.com), <sup>5</sup>[ariansyahdicky49@gmail.com](mailto:ariansyahdicky49@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas bagaimana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal dapat bertahan di tengah arus liberalisasi ekonomi global yang semakin terbuka. Di satu sisi, liberalisasi memberikan peluang besar bagi UMKM halal untuk memperluas pasar hingga ke tingkat internasional. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti mahalnya biaya sertifikasi halal, rendahnya literasi halal, lemahnya rantai pasok, keterbatasan akses pembiayaan syariah, serta belum solidnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, penelitian ini menelaah faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan UMKM halal sekaligus strategi adaptasi yang dilakukan untuk menghadapi tekanan pasar global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan UMKM halal dipengaruhi oleh faktor ekonomi, manajerial, sosial, spiritual, dan dukungan kebijakan publik. Strategi adaptasi yang paling efektif meliputi digitalisasi usaha, inovasi produk, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi bisnis, serta optimalisasi sertifikasi halal. Sertifikasi halal sendiri terbukti tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memperluas akses pasar global dan memperkuat daya saing. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan komunitas bisnis dalam membangun ekosistem UMKM halal yang tangguh, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai Islam di era liberalisasi ekonomi.

**Kata Kunci:** Resiliensi, UMKM Halal, Liberalisasi Ekonomi, Sertifikasi Halal, Ekonomi Syariah

### **PENDAHULUAN**

Resiliensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal dalam menghadapi liberalisasi ekonomi menjadi isu yang semakin penting seiring dengan berkembangnya perekonomian global. Liberalisasi ekonomi mengarah pada pengurangan hambatan perdagangan antarnegara, yang seharusnya membuka peluang baru bagi UMKM halal untuk mengakses pasar internasional. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga membawa tantangan tersendiri bagi UMKM halal, terutama terkait dengan ketatnya persaingan global, peningkatan standar produk, serta kebutuhan untuk memenuhi regulasi yang lebih kompleks. Banyak UMKM halal yang menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan ini, terutama dalam hal teknologi, manajemen, dan pemahaman terhadap dinamika pasar internasional. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi bagaimana UMKM halal dapat membangun ketahanan (resiliensi) yang memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang dalam konteks liberalisasi ekonomi yang semakin pesat.

Di tengah tantangan yang ada, UMKM halal dapat memperoleh manfaat besar jika mereka berhasil mengadaptasi strategi yang tepat untuk menghadapi liberalisasi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperkuat kapasitas internal UMKM, seperti melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan kualitas produk, serta penguatan jaringan bisnis yang lebih luas. Penerapan teknologi digital, misalnya, dapat membuka peluang baru dalam pemasaran dan distribusi produk, sedangkan peningkatan kualitas produk halal dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, pengembangan jejaring bisnis yang kuat dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi yang dapat diterapkan oleh UMKM halal dalam menghadapi tantangan yang dibawa oleh liberalisasi ekonomi.

Meskipun terdapat berbagai solusi yang diajukan untuk mendukung resiliensi UMKM, penelitian ini berfokus pada pengembangan model adaptasi yang konkret dan aplikatif, khususnya untuk sektor UMKM halal di Indonesia. Penelitian ini berupaya menggali faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan UMKM halal dalam menghadapi liberalisasi ekonomi, dan merumuskan strategi yang relevan dengan konteks lokal serta tren global. Melalui pendekatan ini, diharapkan UMKM halal dapat lebih siap dalam mengelola peluang dan tantangan yang ada, serta berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional. Selain itu, model resiliensi yang dikembangkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor UMKM halal agar dapat bersaing secara efektif di pasar internasional.

Berbagai penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai resiliensi UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi, baik di sektor halal, pesantren, maupun UMKM makanan. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai faktor-faktor yang membentuk ketahanan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh <sup>1</sup> yang membahas "Resiliensi Ekonomi Pesantren Melalui Holding Bisnis HEBITREN: Aplikasi Asset Based Community Development." Penelitian ini menunjukkan bagaimana pesantren dapat meningkatkan ketahanan ekonomi mereka melalui pembentukan holding bisnis yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis aset. Konsep ini relevan dalam konteks UMKM halal, yang sering kali menghadapi tantangan dalam pengelolaan bisnis dan akses ke sumber daya. Model bisnis HEBITREN memberikan perspektif yang berguna untuk memperkuat ketahanan UMKM halal di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan pengelolaan sumber daya yang ada

Selain itu, penelitian oleh <sup>2</sup> dalam artikel berjudul "Resiliensi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Menggagas Sistem Tangguh di Masa Depan" membahas ketahanan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ekonomi syariah di Indonesia memiliki daya tahan yang kuat terhadap krisis ekonomi, berkat adanya kebijakan yang mendukung serta adopsi teknologi yang terus berkembang. Di sisi lain, studi ini juga menyoroti pentingnya literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Bagi UMKM halal, temuan ini memberikan dasar yang kuat mengenai pentingnya adopsi sistem keuangan berbasis syariah yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi di masa depan

Penelitian lain yang relevan adalah yang dilakukan oleh <sup>3</sup> yang meneliti "Resiliensi UMKM Makanan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi di Kota Surabaya". Penelitian ini menunjukkan bagaimana sektor UMKM makanan dapat beradaptasi dan bertahan di tengah tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Faktor-faktor seperti inovasi produk, digitalisasi, dan strategi bertahan menjadi kunci dalam meningkatkan ketahanan UMKM makanan. Inovasi dalam produk dan digitalisasi pemasaran dianggap sebagai faktor utama yang memungkinkan UMKM bertahan dan bahkan berkembang di tengah ketidakpastian. Penemuan ini relevan bagi UMKM halal, karena mereka juga dihadapkan pada tantangan serupa, baik dalam hal inovasi produk maupun dalam memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar

Lebih lanjut, penelitian oleh <sup>4</sup> mengenai "Resiliensi Desa Berkemajuan Melalui Optimalisasi Sosial Media dalam Mempublikasikan Potensi Desa Kupuk, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo" juga menyoroti pentingnya media sosial dalam meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi desa. Dalam penelitian ini, desa Kupuk berhasil memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan potensi lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Strategi ini relevan bagi UMKM halal yang beroperasi di daerah pedesaan atau dengan potensi lokal yang belum tergalai secara optimal. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya teknologi dan media sosial sebagai sarana untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan produk halal kepada pasar yang lebih luas

Terakhir, penelitian dari <sup>5</sup> "Upaya Peningkatan Resiliensi Dan Literasi UMKM Melalui Fasilitasi Pembuatan Sertifikat Halal Di Desa Karangbanjar" memberikan perspektif penting tentang bagaimana sertifikasi halal dapat menjadi instrumen yang memperkuat ketahanan UMKM. Dengan memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal, penelitian ini menunjukkan bagaimana pemahaman yang lebih baik mengenai regulasi dan standar halal dapat membantu UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar global. Sertifikasi halal, yang menjadi tantangan bagi banyak UMKM halal, berperan sebagai penguatan struktural yang membantu mereka dalam membangun resiliensi jangka panjang.

Meskipun berbagai penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang resiliensi UMKM halal, masih ada gap yang perlu diisi terkait dengan penerapan model adaptasi yang lebih spesifik dan aplikatif untuk sektor UMKM halal di Indonesia dalam menghadapi liberalisasi ekonomi dan perkembangan global yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menggali faktor-faktor kunci yang mempengaruhi ketahanan UMKM halal dan merumuskan strategi adaptasi yang lebih efektif untuk mengahadapinya.

Berdasarkan latar belakang masalah dan gap yang ditemukan dalam penelitian terdahulu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi UMKM halal dalam

<sup>1</sup> Jeihan Azhar Ali et al., 'RESILIENSI EKONOMI PESANTREN MELALUI HOLDING BISNIS HEBITREN: APLIKASI ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT', *DEVOSI* 5, no. 2 (2024): 130–51.

<sup>2</sup> Nur Laila Abidah and Achmad Fageh, *Resiliensi Ekonomi Syariah Di Indonesia Dalam Menggagas Sistem Tangguh Di Masa Depan*, 2025, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/download/13741/4309>.

<sup>3</sup> Erna Ferrinadewi and Maria Caroline, 'RESILIENSI UMKM MAKANAN DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA SURABAYA', *Jurnal Nusantara Sosial Sains* 1, no. 2 (2025): 7–14, <https://doi.org/10.64020/jnss.v1i2.13>.

<sup>4</sup> Endar Larasati et al., 'RESILIENSI DESA BERKEMAJUAN MELALUI OPTIMALISASI SOSIAL MEDIA DALAM MEMPUBLIKASIKAN POTENSI DESA KUPUK, KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO VILLAGE RESILIENCE PROGRESSING THROUGH SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION IN PUBLICING THE POTENTIAL OF KUPUK VILLAGE, BU', *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 05 (2023): 1075–85.

<sup>5</sup> Widadatul Ulya et al., 'Upaya Peningkatan Resiliensi Dan Literasi UMK Melalui Fasilitasi Pembuatan Sertifikat Halal Di Desa Karangbanjar', *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 162–69, <https://doi.org/10.35311/jmpm.v5i1.400>.

menghadapi liberalisasi ekonomi, serta merumuskan strategi adaptasi yang dapat diterapkan oleh UMKM halal di Indonesia. Melalui kajian pustaka, penelitian ini akan menyintesis berbagai temuan yang ada dan mengidentifikasi model adaptasi yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan UMKM halal di pasar global. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan model yang berbasis pada pendekatan praktis, yang memperhatikan kondisi lokal dan kebutuhan spesifik sektor UMKM halal dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendukung ketahanan UMKM halal, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan yang mendukung sektor UMKM halal di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku UMKM halal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi persaingan internasional. Rekomendasi ini mencakup aspek-aspek penting seperti adopsi teknologi, peningkatan kualitas produk, serta penguatan jaringan pasar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademis, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi dunia usaha, terutama bagi UMKM halal yang ingin meningkatkan daya saing mereka di pasar global.

Secara keseluruhan, penelitian ini berharap dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan mendukung sektor UMKM halal di Indonesia. Melalui temuan-temuan yang dihasilkan, diharapkan pemerintah, pelaku UMKM, dan pihak terkait lainnya dapat lebih memahami dinamika pasar global dan merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM halal di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (literature review) untuk menganalisis resiliensi UMKM halal dalam menghadapi liberalisasi ekonomi. Kajian pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali dan menyintesis berbagai temuan yang ada dalam literatur terkait dengan UMKM halal, liberalisasi pasar global, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi UMKM halal dalam konteks liberalisasi ekonomi dan merumuskan model adaptasi yang aplikatif untuk meningkatkan daya saing UMKM halal di pasar internasional.

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan sumber pustaka yang relevan. Peneliti mengumpulkan literatur dari berbagai sumber akademik terpercaya, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, disertasi, dan tesis yang membahas topik terkait dengan UMKM halal dan liberalisasi ekonomi. Sumber pustaka yang dipilih mencakup literatur dari database seperti Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, dan ProQuest. Selain itu, peneliti juga mencari sumber-sumber yang dapat memberikan perspektif lokal tentang UMKM halal di Indonesia dan tantangan yang mereka hadapi di pasar global. Pemilihan sumber pustaka dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan metode yang digunakan dalam studi-studi sebelumnya.

Setelah pengumpulan literatur, peneliti melakukan seleksi sumber pustaka untuk memastikan bahwa hanya sumber yang paling relevan dan berkualitas tinggi yang digunakan. Seleksi ini melibatkan analisis kritis terhadap setiap sumber untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan berkaitan langsung dengan topik penelitian, yakni resiliensi UMKM halal dan adaptasi mereka terhadap liberalisasi ekonomi. Selain itu, peneliti juga memastikan bahwa sumber-sumber yang dipilih mencakup perspektif yang beragam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan UMKM halal, baik dalam aspek manajerial, teknologi, kebijakan, maupun globalisasi.

Tahap selanjutnya adalah analisis tematik terhadap sumber pustaka yang telah diseleksi. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber pustaka, seperti tantangan yang dihadapi UMKM halal, adaptasi yang diterapkan, dan faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan mereka dalam menghadapi liberalisasi ekonomi. Proses ini melibatkan pengelompokan informasi berdasarkan tema yang relevan, seperti adopsi teknologi, inovasi produk, peningkatan kualitas, serta penguatan jejaring bisnis. Dengan demikian, peneliti dapat membangun pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana UMKM halal dapat bertahan dan berkembang dalam pasar global.

Selain itu, peneliti juga melakukan sintesis temuan dari berbagai literatur yang telah dianalisis. Sintesis ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai hasil penelitian yang ada, mencocokkan temuan-temuan yang serupa, serta menyoroti perbedaan atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berperan dalam membentuk resiliensi UMKM halal, serta bagaimana strategi adaptasi yang telah diterapkan dapat menjadi acuan dalam konteks Indonesia.

Untuk memastikan validitas dan keandalan hasil kajian pustaka, peneliti melakukan triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan temuan-temuan dari berbagai sumber pustaka yang berbeda dan memeriksa kesesuaian hasil analisis. Peneliti juga memastikan bahwa hanya sumber pustaka yang memiliki kredibilitas tinggi yang digunakan, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti dapat mengurangi potensi bias dan memastikan bahwa temuan-temuan yang dihasilkan akurat serta dapat dipercaya.

Setelah seluruh tahap analisis dan sintesis selesai, peneliti menyusun laporan penelitian yang mengintegrasikan hasil temuan-temuan dari kajian pustaka. Laporan ini mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang resiliensi UMKM halal dalam menghadapi liberalisasi ekonomi, serta strategi adaptasi yang dapat diterapkan oleh UMKM halal di Indonesia. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh, peneliti merumuskan model adaptasi yang aplikatif untuk sektor UMKM halal, dengan fokus pada aspek-aspek seperti adopsi teknologi, pengembangan kualitas produk, dan penguatan jejaring bisnis. Selain itu, laporan ini juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pelaku UMKM untuk memperkuat daya saing UMKM halal di pasar global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tantangan yang Dihadapi UMKM Halal dalam Liberalisasi Ekonomi

Liberalisasi ekonomi yang semakin terbuka memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sektor UMKM halal di Indonesia. Di satu sisi, kebijakan liberalisasi membuka peluang besar bagi produk halal untuk menembus pasar global yang kini mencapai nilai lebih dari USD 3 triliun pada tahun 2025. Namun, di sisi lain, pelaku UMKM halal harus berhadapan dengan tantangan kompleks, mulai dari biaya sertifikasi, rendahnya literasi halal, hingga lemahnya dukungan pembiayaan dan koordinasi antar lembaga pemerintah.

Menurut Harahap (2023), liberalisasi ekonomi menuntut UMKM halal untuk mampu bersaing dalam kualitas, efisiensi, dan kepatuhan syariah, bukan hanya harga.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, banyak UMKM yang belum siap menghadapi tuntutan global akibat keterbatasan sumber daya, literasi, dan infrastruktur halal yang belum matang.

#### a) Biaya dan Prosedur Sertifikasi Halal

Biaya sertifikasi halal masih menjadi hambatan mendasar bagi UMKM. Proses sertifikasi melibatkan berbagai tahapan seperti audit bahan baku, pemeriksaan fasilitas produksi, dan implementasi *Halal Assurance System (HAS)*. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, biaya tersebut dinilai tinggi karena bisa mencapai Rp3 juta–Rp10 juta per produk, belum termasuk biaya pelatihan dan administrasi.<sup>7</sup>

Selain itu, prosedur sertifikasi halal yang panjang dan birokratis menimbulkan beban administratif bagi UMKM. Kurangnya tenaga pendamping dan keterbatasan informasi tentang mekanisme pengajuan ke BPJPH serta LPPOM MUI juga memperlambat proses sertifikasi. Studi Rahmawati & Fathoni (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 60% UMKM menunda pengajuan sertifikasi karena terkendala biaya dan lamanya proses verifikasi.<sup>8</sup>

Program pemerintah seperti Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sebenarnya menjadi solusi penting, tetapi cakupannya masih sangat terbatas dan belum menjangkau UMKM di luar Pulau Jawa.

#### b) Rendahnya Literasi Halal di Kalangan Pelaku Usaha

Literasi halal berperan penting dalam memastikan pelaku UMKM memahami prinsip kehalalan secara menyeluruh. Namun, banyak UMKM yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai pentingnya *halal assurance system* dan prosedur audit halal.

Menurut Nasution et al. (2022), hanya sekitar 35% pelaku UMKM di sektor pangan yang memahami secara utuh komponen penting sertifikasi halal, termasuk bahan baku, proses, dan kebersihan fasilitas produksi.<sup>9</sup>

Keterbatasan literasi halal juga berimplikasi pada rendahnya kesadaran akan peluang pasar halal global. Banyak pelaku usaha yang tidak menyadari bahwa standar halal internasional (seperti MS 1500:2019 di

<sup>6</sup> Harahap, F. (2023). "UMKM Halal dan Tantangan Daya Saing di Era Liberalisasi Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(2).

<sup>7</sup> BPJPH. (2023). *Laporan Tahunan Sertifikasi Halal Nasional*. Kemenag RI.

<sup>8</sup> Rahmawati, S., & Fathoni, M. (2021). *Analisis Hambatan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(3).

<sup>9</sup> Nasution, R., Hidayat, A., & Lestari, S. (2022). "Literasi Halal dan Kesiapan UMKM Menghadapi Globalisasi", *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, Vol. 10(1).

Malaysia atau GSO di Timur Tengah) dapat menjadi kunci akses ekspor. Rendahnya literasi ini juga menghambat internalisasi nilai halal dalam proses bisnis, sehingga usaha belum bisa memanfaatkan potensi nilai tambah dari label halal.

### c) Lemahnya Rantai Pasok Halal (Halal Supply Chain)

Rantai pasok halal (halal supply chain) menjadi salah satu tantangan serius bagi pengembangan UMKM halal di Indonesia. Banyak pelaku usaha masih bergantung pada pemasok bahan baku yang belum memiliki sertifikasi halal, sehingga sulit memastikan kehalalan produk secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap integritas dan kepercayaan konsumen terhadap produk halal nasional.

Kusnadi (2024) mencatat bahwa hanya sekitar 27% pelaku UMKM halal di Indonesia yang memiliki sistem *traceability* atau ketertelusuran bahan baku yang memadai.<sup>10</sup> Ketiadaan sistem distribusi halal yang efisien juga menurunkan daya saing produk, terutama di tengah meningkatnya persaingan global. Masalah logistik seperti tidak tersedianya *cold chain system* halal menyebabkan risiko kontaminasi bahan selama proses pengiriman. Selain itu, minimnya kolaborasi antara pemerintah, BPJPH, dan lembaga logistik halal membuat rantai pasok halal nasional belum terintegrasi secara optimal.

Dalam konteks liberalisasi ekonomi global, rantai pasok halal merupakan elemen kunci yang menentukan daya saing produk halal Indonesia. Rantai pasok ini tidak hanya berkaitan dengan aspek logistik dan distribusi, tetapi juga menyangkut integritas kehalalan produk dari tahap bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga ke tangan konsumen. Ketika sistem rantai pasok lemah, kepercayaan pasar terhadap produk halal domestik ikut menurun. Hal ini menjadi tantangan besar yang saat ini dihadapi oleh mayoritas UMKM halal di Indonesia.

Menurut Kamaruddin et al. (2022), rantai pasok halal yang efektif harus menjamin *traceability* (ketertelusuran bahan baku), transparansi informasi, serta konsistensi standar halal di seluruh proses produksi.<sup>11</sup> Namun dalam praktiknya, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sistem dan infrastruktur yang mampu menjamin hal tersebut. Keterbatasan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya penerapan teknologi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta kurangnya sistem pengawasan halal yang terintegrasi secara nasional.

### d) Akses Permodalan dan Pembiayaan Syariah yang Terbatas

Masalah klasik yang dihadapi UMKM halal adalah kesulitan memperoleh pembiayaan syariah. Sebagian besar lembaga keuangan syariah masih cenderung menyalurkan dana untuk sektor konsumtif, sementara pembiayaan produktif bagi UMKM halal sangat terbatas. Selain itu, mekanisme penyaluran dana juga belum sepenuhnya mendukung model bisnis UMKM yang bersifat fleksibel dan berbasis komunitas. Padahal, pembiayaan syariah yang efektif dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan resiliensi dan daya saing di tengah liberalisasi ekonomi global.

<sup>10</sup> Kusnadi, T. (2024). *Analisis Efisiensi dan Traceability Rantai Pasok Halal UMKM Indonesia*. Jurnal Logistik dan Bisnis Halal, 5(1).

<sup>11</sup> Kamaruddin, N., Yusuf, M., & Rahman, H. (2022). *Challenges of Halal Supply Chain Implementation among SMEs*. International Journal of Halal Studies, 3(2), 55–70.



Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) menunjukkan bahwa hanya sekitar 23% dari total pembiayaan syariah yang disalurkan ke sektor UMKM.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa penyebab utama rendahnya akses tersebut:

- Kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang produk keuangan syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah*.
- Persyaratan administratif yang masih rumit, terutama dalam hal agunan atau rekam jejak keuangan.
- Keterbatasan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di wilayah pedesaan, tempat sebagian besar UMKM halal beroperasi.

Menurut Wahyudi (2025), kendala utama yang dihadapi UMKM halal dalam mengakses pembiayaan syariah bukan hanya faktor teknis, tetapi juga persepsi bahwa pembiayaan syariah kurang fleksibel dibandingkan kredit konvensional.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi dan edukasi antara lembaga keuangan dan pelaku usaha.

Selain itu, banyak UMKM halal belum memiliki laporan keuangan yang terstandarisasi, sehingga sulit memenuhi kriteria analisis kelayakan kredit (*credit scoring*). Padahal, tanpa dukungan pembiayaan, mereka tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan distribusi, atau mengadopsi teknologi baru untuk memperkuat daya saing.

#### e) Kompetisi Pasar dan Branding/Akses Pasar Internasional

Persaingan di pasar halal global semakin ketat. Produk-produk halal dari Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam telah memiliki branding kuat dan dukungan pemerintah yang besar. Sebaliknya, UMKM halal di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam membangun merek yang diakui secara internasional. Studi oleh Mulyani & Fatimah (2024) menunjukkan bahwa hanya sekitar 18% produk UMKM halal Indonesia yang menembus pasar ekspor.<sup>14</sup>

Kurangnya strategi branding halal yang sistematis, minimnya promosi digital global, serta belum adanya sistem e-commerce halal nasional menjadi hambatan utama dalam memperluas pasar ekspor. Kelemahan ini diperparah dengan rendahnya literasi pemasaran digital dan keterbatasan bahasa promosi internasional pada pelaku UMKM.

#### f) Fragmentasi Regulasi dan Koordinasi Kelembagaan

Tantangan lain yang krusial adalah fragmentasi regulasi dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, tanggung jawab penyelenggaraan sertifikasi halal tersebar di antara berbagai lembaga seperti BPJPH, MUI, dan Kemenperin. Namun, koordinasi antar lembaga tersebut masih belum solid, sehingga menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan keterlambatan proses layanan publik.

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Keuangan Syariah Indonesia 2024: Perkembangan Pembiayaan UMKM*. Jakarta: OJK.

<sup>13</sup> Wahyudi, H. (2025). *Pembiayaan Syariah dan Resiliensi UMKM Halal di Indonesia*. *Jurnal Keuangan Islam Indonesia*, 12(1), 65–79

<sup>14</sup> Mulyani, F. & Fatimah, L. (2024). *Digitalisasi dan Daya Saing UMKM Halal di Era Ekonomi Global*. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 8(1), 101–118.

Menurut laporan Pusat Kajian Industri Halal KNEKS (2023), keterlambatan koordinasi ini menyebabkan 40% pengajuan sertifikasi halal dari UMKM belum terselesaikan tepat waktu.<sup>15</sup> Fragmentasi ini juga memperlemah konsistensi standar halal antara pusat dan daerah.

## 2. Strategi Adaptasi yang Dilakukan UMKM Halal

Liberalisasi ekonomi memaksa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal untuk beradaptasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah kompetisi global. Adaptasi ini tidak hanya mencakup aspek produksi, tetapi juga strategi pemasaran, inovasi, digitalisasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, strategi adaptasi menjadi elemen penting untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM halal di pasar domestik maupun internasional.

### a) Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi

Salah satu strategi utama yang dilakukan UMKM halal adalah digitalisasi proses bisnis. Transformasi digital memungkinkan pelaku usaha memperluas pasar melalui platform e-commerce, media sosial, dan marketplace halal. Dengan kehadiran teknologi digital, UMKM dapat menghemat biaya promosi, menjangkau konsumen lintas daerah, dan memperkuat citra merek halal mereka.

Penelitian oleh Ismail dan Fadillah (2023) menegaskan bahwa UMKM halal yang aktif menggunakan platform digital seperti Tokopedia, Shopee, dan HalalHub.id mengalami peningkatan penjualan hingga 45% dalam enam bulan pertama setelah beralih ke pemasaran digital.<sup>16</sup> Selain itu, digitalisasi juga membantu menciptakan sistem manajemen data halal yang lebih transparan, termasuk pelacakan bahan baku (*traceability*).

Namun demikian, kendala utama terletak pada rendahnya literasi digital pelaku usaha. Banyak UMKM halal belum memahami cara mengintegrasikan sistem pembayaran syariah atau mengelola konten digital yang sesuai prinsip halal marketing. Untuk itu, dukungan dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta BPJPH menjadi penting dalam memberikan pelatihan dan pendampingan digital berbasis halal.

### b) Inovasi dan Diversifikasi Produk

Adaptasi lain yang penting adalah inovasi produk dan diversifikasi usaha. UMKM halal harus mampu menyesuaikan produk dengan preferensi konsumen yang terus berubah, tanpa meninggalkan prinsip kehalalan. Misalnya, banyak pelaku UMKM kuliner mulai mengembangkan produk *plant-based halal food*, kosmetik halal berbasis bahan alami, serta produk kesehatan dengan sertifikasi halal.

Menurut studi Nursanti & Putra (2022), inovasi produk menjadi faktor utama dalam mempertahankan loyalitas konsumen di pasar halal.<sup>17</sup> Produk inovatif yang menggabungkan aspek kehalalan dan tren gaya hidup sehat terbukti lebih mudah diterima pasar. Di sisi lain, inovasi juga dilakukan dalam hal kemasan, pemasaran, dan distribusi berbasis *green economy*, yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan Islam.

<sup>15</sup> KNEKS. (2023). *Laporan Ekosistem Industri Halal Nasional*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

<sup>16</sup> Ismail, H., & Fadillah, N. (2023). *Digital Transformation of Halal SMEs in Indonesia: Challenges and Opportunities*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 23–40

<sup>17</sup> Nursanti, E., & Putra, D. (2022). *Inovasi Produk Halal dan Preferensi Konsumen di Era Modernisasi Pasar*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 8(2), 99–114.

Salah satu contoh sukses datang dari Wardah Cosmetics, yang secara konsisten memperkuat branding sebagai kosmetik halal pertama di Indonesia. Melalui riset dan inovasi bahan alami bersertifikat halal, Wardah mampu menembus pasar global dan menjadi pelopor *halal beauty brand* di Asia Tenggara.<sup>18</sup>

### c) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Halal

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam strategi adaptasi UMKM halal. Banyak pelaku UMKM menghadapi tantangan dalam memahami standar halal, manajemen usaha, serta pemasaran berbasis nilai Islam. Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi halal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing.

Riset oleh Setiawan dan Hamid (2024) menunjukkan bahwa program pelatihan halal yang diselenggarakan BPJPH dan MUI mampu meningkatkan kepatuhan UMKM terhadap *Halal Assurance System (HAS 23000)* hingga 60%.<sup>19</sup> Pelatihan ini juga membentuk kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya integritas halal dalam setiap rantai produksi.

Selain pelatihan teknis, peningkatan kapasitas SDM juga mencakup penguatan nilai spiritual dan etika bisnis Islam. Pelaku UMKM yang menjadikan nilai kejujuran, amanah, dan keadilan sebagai dasar operasional terbukti memiliki ketahanan usaha yang lebih baik di tengah krisis ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai strategi adaptif dalam menghadapi liberalisasi ekonomi.

### d) Kolaborasi dan Kemitraan Strategis

Strategi berikutnya adalah memperkuat kolaborasi antar pelaku usaha serta membangun kemitraan dengan lembaga pendukung, baik pemerintah maupun swasta. Kolaborasi memungkinkan UMKM halal mengakses pasar yang lebih luas, memperoleh bahan baku halal yang stabil, dan berbagi infrastruktur produksi. Selain itu, kemitraan dengan industri besar atau lembaga sertifikasi dapat membantu mempercepat proses legalisasi produk halal.

Penelitian oleh Fauziah dan Ananda (2023) menegaskan bahwa UMKM yang tergabung dalam jaringan kluster industri halal menunjukkan peningkatan omzet rata-rata 38% dibandingkan UMKM yang berdiri sendiri.<sup>20</sup> Program *Halal Industrial Park Indonesia (HIPI)* yang diluncurkan pemerintah menjadi contoh nyata sinergi antara sektor publik dan swasta dalam memperkuat ekosistem halal nasional.

Kemitraan juga mencakup kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) atau BMT. Pembiayaan berbasis akad syariah seperti *murabahah* dan *mudharabah* terbukti membantu UMKM halal meningkatkan kapasitas produksi tanpa harus menanggung beban bunga.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Rahman, M., & Yusuf, N. (2023). *Halal Branding Strategy: The Case of Wardah Cosmetics in Indonesia*. *Asian Journal of Islamic Marketing*, 4(1), 55–72.

<sup>19</sup> Setiawan, R., & Hamid, Z. (2024). *Pelatihan Halal dan Penguatan Kompetensi UMKM di Indonesia*. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(1), 44–59.

<sup>20</sup> Fauziah, N., & Ananda, R. (2023). *Cluster-Based Halal Industry Development and Its Impact on SMEs' Growth*. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 7(3), 75–92.

<sup>21</sup> Yusuf, S. (2022). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pembiayaan UMKM Halal*. *Jurnal Keuangan Islam dan Bisnis*, 10(1), 88–104.



### e) Pemanfaatan Kebijakan dan Insentif Pemerintah

Adaptasi strategis terakhir adalah pemanfaatan kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan UMKM halal. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program seperti *Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)*, *Halal Value Chain*, dan *Industri Halal Nasional 2025*. Program-program ini bertujuan mempercepat proses sertifikasi, menekan biaya, dan memperkuat kapasitas usaha halal.

Menurut BPJPH (2025), terdapat peningkatan signifikan jumlah UMKM yang memperoleh sertifikasi halal melalui program SEHATI, yaitu dari 25.000 pada 2022 menjadi lebih dari 80.000 pada 2025.<sup>22</sup> Ini menunjukkan efektivitas kebijakan publik dalam mendorong transformasi UMKM halal agar siap bersaing di era liberalisasi ekonomi.

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga dan konsistensi pelaksanaannya di daerah. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan asosiasi UMKM perlu terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan ekosistem halal nasional.

## 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resiliensi UMKM Halal

Resiliensi atau daya tahan UMKM halal menggambarkan kemampuan pelaku usaha untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari tekanan ekonomi global, termasuk dari dampak liberalisasi pasar, fluktuasi harga bahan baku, serta persaingan produk impor. Faktor-faktor yang memengaruhi resiliensi ini tidak hanya bersifat ekonomi dan manajerial, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan kebijakan publik yang mendukung keberlanjutan usaha halal di Indonesia.

### a) Faktor Ekonomi: Akses Permodalan dan Efisiensi Biaya Produksi

Faktor ekonomi menjadi komponen paling mendasar dalam menentukan ketahanan UMKM halal. Akses terhadap modal usaha, efisiensi biaya produksi, serta stabilitas rantai pasok menjadi tantangan yang terus dihadapi pelaku usaha kecil. Dalam konteks liberalisasi ekonomi, UMKM halal sering kali kalah bersaing dengan produk luar negeri yang memiliki efisiensi produksi lebih tinggi.

Menurut Kurniawati dan Hidayat (2022), lebih dari 60% UMKM halal di Indonesia masih bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal karena kesulitan memenuhi persyaratan administrasi lembaga keuangan.<sup>23</sup> Keterbatasan modal ini berdampak pada rendahnya kapasitas produksi dan inovasi. Meski demikian, kehadiran lembaga keuangan syariah (LKS) seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) telah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah melalui skema *mudharabah*, *murabahah*, dan *qardhul hasan*.

Selain pembiayaan, efisiensi biaya sertifikasi halal juga berpengaruh terhadap ketahanan usaha. Banyak UMKM mengalami kesulitan karena proses sertifikasi membutuhkan biaya audit, pengujian laboratorium, serta pembenahan fasilitas produksi. Oleh sebab itu, program pemerintah seperti *Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)* terbukti menjadi intervensi penting untuk meningkatkan daya saing.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> BPJPH. (2025). *Laporan Tahunan Sertifikasi Halal Nasional 2025*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

<sup>23</sup> Kurniawati, R., & Hidayat, A. (2022). *Financial Challenges of Halal SMEs in the Liberal Economy Era*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 110–127.

<sup>24</sup> BPJPH. (2025). *Laporan Program SEHATI dan Dampaknya terhadap Daya Saing UMKM Halal*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

**b) Faktor Manajerial: Kemampuan Inovasi dan Adaptasi Bisnis**

Faktor manajerial mencakup kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya, berinovasi, serta menyesuaikan strategi bisnis terhadap perubahan pasar. UMKM halal yang memiliki manajemen adaptif cenderung lebih tangguh menghadapi perubahan lingkungan eksternal, seperti pandemi COVID-19 dan lonjakan harga bahan baku.

Penelitian oleh Lubis dan Hasanah (2023) menunjukkan bahwa UMKM halal yang memiliki sistem manajemen berbasis inovasi—misalnya dengan mengadopsi *lean production*, digital marketing, dan pengelolaan rantai pasok halal—mampu bertahan lebih lama dibandingkan yang tidak melakukan inovasi manajerial.<sup>25</sup> Penggunaan teknologi sederhana seperti aplikasi akuntansi syariah dan e-commerce halal juga terbukti meningkatkan efisiensi hingga 30%.

Selain itu, kemampuan adaptif dalam mengelola sumber daya manusia menjadi penentu penting. Pelaku UMKM yang memiliki tim kerja berorientasi pada nilai halal dan efisiensi menunjukkan kinerja yang lebih stabil di tengah tekanan pasar.<sup>26</sup> Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen Islam yang menekankan *amanah*, *itqan* (profesionalitas), dan *maslahah* (kemanfaatan).

**c) Faktor Sosial dan Jaringan Kemitraan**

Faktor sosial berperan besar dalam memperkuat resiliensi UMKM halal. Dukungan komunitas, jaringan usaha, dan asosiasi UMKM halal menciptakan ekosistem kolaboratif yang memperkuat posisi tawar pelaku usaha kecil. Dalam konteks ini, social capital (modal sosial) menjadi aset yang tidak kalah penting dibanding modal finansial.

Menurut riset Zahra dan Fitria (2024), UMKM halal yang aktif bergabung dalam komunitas seperti *Indonesia Halal Lifestyle Center* (IHLC) atau *Komunitas UMKM Halal Indonesia* memiliki peluang 40% lebih besar untuk mendapatkan akses pelatihan, promosi, dan jaringan pasar baru.<sup>27</sup> Jaringan kemitraan juga memungkinkan berbagi informasi bahan baku halal, mengakses logistik bersama, serta mengelola distribusi produk secara efisien.

Kolaborasi lintas sektor—antara pelaku UMKM, akademisi, pemerintah, dan industri besar—membentuk model *quadruple helix* dalam pengembangan ekonomi halal.<sup>28</sup> Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan bisnis, tetapi juga mempercepat proses sertifikasi dan digitalisasi di sektor halal nasional.

**d) Faktor Spiritual dan Nilai-Nilai Islam**

Salah satu pembeda utama antara UMKM halal dan non-halal adalah adanya nilai spiritual Islam sebagai landasan operasional bisnis. Nilai seperti *kejujuran* (*shidq*), *amanah*, *adil*, dan *tanggung jawab* membentuk etika bisnis yang memperkuat kepercayaan konsumen dan loyalitas pasar.

<sup>25</sup> Lubis, A., & Hasanah, D. (2023). *Inovasi Manajerial dan Ketahanan UMKM Halal di Era Digital*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 8(1), 67–84.

<sup>26</sup> Azzahra, F. (2024). *Manajemen Adaptif dan Peningkatan Daya Saing UMKM Halal*. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 10(3), 91–107.

<sup>27</sup> Zahra, N., & Fitria, L. (2024). *The Role of Social Capital in Enhancing Halal SMEs Resilience*. *Indonesian Journal of Halal Industry*, 3(2), 45–60.

<sup>28</sup> Hasan, M., & Putri, E. (2023). *Quadruple Helix Collaboration Model in Halal Ecosystem Development*. *Jurnal Inovasi Ekonomi Islam*, 5(1), 72–88.

Studi oleh Rahman dan Sari (2023) menegaskan bahwa integrasi etika bisnis Islam meningkatkan *customer trust* dan *brand loyalty* hingga 50% di sektor makanan dan kosmetik halal.<sup>29</sup> Pelaku usaha yang konsisten menjalankan prinsip syariah juga lebih cenderung menjaga kehalalan bahan baku, transparansi harga, dan kesejahteraan pekerja.

Selain itu, faktor spiritual berperan dalam membangun ketenangan psikologis pelaku usaha, terutama saat menghadapi krisis ekonomi. Pengusaha yang memandang usaha sebagai bentuk ibadah (*ibadah muamalah*) menunjukkan ketahanan mental yang lebih tinggi, karena orientasi bisnis mereka tidak semata pada keuntungan materi, melainkan juga keberkahan (*barakah*).<sup>30</sup>

#### e) Faktor Kebijakan dan Dukungan Ekosistem Halal Nasional

Faktor terakhir yang memengaruhi resiliensi UMKM halal adalah dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk membangun ekosistem halal yang inklusif dan kompetitif.

Program seperti *Halal Product Industry Development Roadmap 2023–2029* dan *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2024* memberikan arah strategis bagi penguatan UMKM halal melalui sertifikasi massal, insentif fiskal, dan kemitraan industri.<sup>31</sup> Hasilnya, Indonesia berhasil naik ke peringkat ke-3 dunia dalam *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)* tahun 2024 setelah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.<sup>32</sup>

Kendati demikian, tantangan masih ada pada level implementasi, terutama dalam koordinasi antar lembaga seperti BPJPH, MUI, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan publik dan sinergi multi-stakeholder menjadi syarat penting agar UMKM halal dapat benar-benar tangguh di era liberalisasi ekonomi.

### 4. Peran Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Resiliensi Umkm

#### a) Hubungan Antara Sertifikasi Halal dan Resiliensi

Sertifikasi halal bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat resiliensi ekonomi pelaku UMKM. Resiliensi sendiri diartikan sebagai kemampuan suatu entitas untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh dalam menghadapi tekanan ekonomi, sosial, maupun pasar global yang dinamis<sup>[1]</sup>.

Dalam konteks UMKM halal, sertifikasi halal memberikan jaminan kepercayaan, akses pasar yang lebih luas, serta peningkatan kualitas manajemen produksi yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan usaha.

<sup>29</sup> Rahman, T., & Sari, N. (2023). *Integrating Islamic Ethics and Business Resilience in Halal SMEs*. *Asian Journal of Islamic Management*, 4(2), 100–117.

<sup>30</sup> Yusuf, R. (2022). *Nilai Spiritual dan Ketenangan Pelaku Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Psikologi Islam dan Bisnis*, 6(1), 55–71

<sup>31</sup> KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). (2024). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2024–2029*. Jakarta: KNEKS.

<sup>32</sup> DinarStandard. (2024). *State of the Global Islamic Economy Report 2024*. Dubai: DinarStandard.

Dengan adanya regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, sertifikasi halal menjadi faktor strategis yang memperkuat daya tahan UMKM terhadap fluktuasi ekonomi dan kompetisi pasar bebas<sup>[^2]</sup>.

#### **b) Sertifikasi Halal sebagai Jaminan Kualitas dan Kepercayaan Konsumen**

Sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan kualitas dan integritas produk, yang meningkatkan kepercayaan konsumen baik di pasar domestik maupun internasional. Kepercayaan ini berdampak pada loyalitas konsumen, citra merek (brand image), serta reputasi perusahaan di mata publik.<sup>33</sup> Menurut penelitian Arifin dan Rahmawati (2023) dalam *Jurnal Ekonomi Syariah dan Halal Studies*, UMKM yang memiliki sertifikat halal mengalami peningkatan penjualan hingga 27% dibandingkan dengan UMKM tanpa sertifikasi, karena konsumen merasa lebih aman dan percaya terhadap produk yang dikonsumsi.<sup>34</sup>

Selain itu, sertifikasi halal juga membantu produsen dalam menghindari krisis kepercayaan publik, terutama di era digital di mana isu kehalalan dapat cepat menyebar melalui media sosial. Dengan demikian, sertifikasi halal berperan dalam memperkuat resiliensi reputasi dan kepercayaan pasar, yang menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan UMKM.

#### **c) Membuka Akses Pasar Global Halal**

Sertifikasi halal menjadi tiket penting bagi UMKM untuk memasuki pasar global yang semakin menuntut jaminan kehalalan dan keamanan produk. Negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, dan bahkan Jepang telah menerapkan standar halal yang ketat bagi produk impor.<sup>35</sup> Menurut penelitian oleh Lubis et al. (2021) dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Indonesia*, UMKM dengan sertifikat halal memiliki peluang ekspor 35% lebih tinggi dibandingkan yang belum tersertifikasi. Hal ini karena sertifikasi halal diakui sebagai bagian dari Non-Tariff Measures (NTM) yang memengaruhi kelancaran ekspor-impor.<sup>36</sup>

Selain membuka pasar baru, sertifikasi halal juga memperkuat posisi tawar UMKM di rantai pasok internasional. Produk yang telah bersertifikat halal lebih mudah diterima oleh importir besar, hotel, restoran, dan supermarket global, sehingga memperluas jejaring distribusi dan meningkatkan resiliensi pasar.

#### **d) Meningkatkan Efisiensi Internal dan Pengendalian Mutu**

Sertifikasi halal menuntut UMKM menerapkan Halal Assurance System (HAS), yaitu sistem pengendalian mutu yang memastikan setiap tahap produksi sesuai dengan prinsip kehalalan dan kebersihan.<sup>37</sup> Menurut LPPOM MUI (2023), penerapan HAS membantu perusahaan menata rantai pasok, meningkatkan efisiensi bahan baku, dan mengurangi risiko kontaminasi silang. Sistem ini juga memperkuat resiliensi operasional, karena pelaku usaha menjadi lebih disiplin dalam manajemen produksi, dokumentasi bahan, dan pengawasan internal.

<sup>33</sup> Rahmawati, S. & Huda, M. (2022). "Peran Sertifikasi Halal terhadap Kepercayaan Konsumen Produk UMKM Pangan", *Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, Vol. 8(2)

<sup>34</sup> BPJPH Kementerian Agama (2022). *Laporan Tahunan Sertifikasi Halal dan Ekspor Produk Indonesia*.

<sup>35</sup> BPJPH Kementerian Agama (2022). *Laporan Tahunan Sertifikasi Halal dan Ekspor Produk Indonesia*.

<sup>36</sup> Lubis, F. & Nurdin, Z. (2021). "Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Peluang Ekspor UMKM Pangan", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Indonesia*, Vol. 5(3).

<sup>37</sup> LPPOM MUI. (2023). *Pedoman Sistem Jaminan Halal (SJH) Edisi 2023*.

Penelitian Rahman et al. (2022) dalam *Jurnal Manajemen dan Bisnis Halal* menunjukkan bahwa implementasi HAS mampu menurunkan tingkat cacat produk hingga 18%, sekaligus meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pengendalian prosedur yang standar.<sup>38</sup>

#### e) Meningkatkan Daya Saing dan Diferensiasi Produk

Dalam pasar yang semakin kompetitif, sertifikasi halal menjadi nilai tambah (value differentiation) yang membuat produk UMKM lebih unggul dibanding produk sejenis. Menurut Nugroho & Fatimah (2024), sertifikasi halal bukan hanya faktor religius, tetapi juga bentuk strategi branding yang menggabungkan etika, keamanan, dan keandalan produk.<sup>39</sup> Konsumen non-Muslim pun kini melihat label halal sebagai simbol kualitas, higienitas, dan keamanan pangan, sehingga cakupan pasarnya lebih luas.

Sertifikasi halal berkontribusi terhadap resiliensi kompetitif, karena memungkinkan UMKM tetap relevan dan dipercaya di tengah perubahan tren konsumen global yang mengarah pada produk etis dan berkelanjutan.

#### f) Peran Pemerintah dan BPJPH dalam Memfasilitasi Resiliensi UMKM Halal

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan penting dalam membangun resiliensi UMKM dengan menyediakan fasilitas pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan sertifikasi halal. Program *Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)* yang dijalankan BPJPH sejak tahun 2022 telah membantu lebih dari 1 juta UMKM memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya.<sup>40</sup> Langkah ini memperkuat resiliensi sosial-ekonomi, karena membantu pelaku usaha kecil bertahan di tengah krisis ekonomi global dan memperluas jaringan kemitraan.

Selain itu, sinergi antara BPJPH, Kementerian Koperasi dan UKM, serta perguruan tinggi telah menghasilkan berbagai program inkubasi bisnis halal dan digitalisasi proses sertifikasi, yang mempercepat adaptasi UMKM terhadap ekonomi global berbasis halal.

### 5. Implikasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Resiliensi Umkm Halal

Liberalisasi ekonomi telah menciptakan arus perdagangan dan investasi yang semakin terbuka di berbagai sektor, termasuk industri halal. Keterbukaan ini membawa peluang bagi UMKM halal Indonesia untuk menembus pasar global yang permintaannya terus meningkat. Namun, di sisi lain, liberalisasi juga menghadirkan tantangan besar, seperti kompetisi lintas negara, tekanan standardisasi internasional, dan ketergantungan pada rantai pasok global yang dinamis. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah harus mampu menavigasi keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil agar mereka tidak menjadi korban kompetisi bebas yang tidak seimbang.

Lebih jauh lagi, sektor UMKM halal memiliki dimensi strategis karena tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi nasional. Ketahanan (resilience) UMKM halal tidak bisa dilepaskan dari upaya kolektif pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan usaha yang adil, etis, dan berkelanjutan. Oleh

<sup>38</sup> Rahman, F. et al. (2022). "Efektivitas Sistem Jaminan Halal terhadap Efisiensi Produksi UMKM", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Halal*, Vol. 6(1).

<sup>39</sup> Nugroho, A. & Fatimah, N. (2024). "Halal Certification as Competitive Advantage for SMEs", *Asian Journal of Business and Management*, Vol. 12(2).

<sup>40</sup> BPJPH (2023). *Laporan Kinerja Program SEHATI Tahun 2023*.



sebab itu, kebijakan publik harus diarahkan untuk memperkuat fondasi kelembagaan, memperluas akses sumber daya, serta memastikan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil yang berorientasi pada nilai-nilai syariah.

Dalam era liberalisasi ekonomi yang semakin terbuka, pelaku UMKM halal menghadapi tantangan besar sekaligus peluang luas. Persaingan pasar global menuntut pelaku usaha untuk tidak hanya mampu memproduksi secara efisien, tetapi juga beradaptasi dengan standar internasional dan dinamika teknologi. Oleh karena itu, kebijakan publik berperan sentral dalam memperkuat resiliensi UMKM halal agar mampu bertahan, bertransformasi, dan berdaya saing di tengah arus globalisasi. Kebijakan yang diambil seharusnya tidak sekadar berorientasi ekonomi, melainkan juga menjunjung nilai keadilan, etika, dan keberlanjutan sosial sesuai prinsip syariah.

Secara umum, ada tiga arah kebijakan utama yang dapat diterapkan untuk memperkuat ketahanan UMKM halal di tengah liberalisasi ekonomi:

a) Kebijakan Penguatan Akses Pembiayaan, Fiskal, dan Regulasi Halal

Pemerintah perlu memperluas akses terhadap pembiayaan berbasis syariah melalui lembaga keuangan mikro, perbankan syariah, maupun kemitraan dengan fintech halal. Skema pembiayaan yang berlandaskan prinsip bagi hasil dapat menjadi solusi inklusif bagi pelaku usaha kecil yang kesulitan memperoleh modal. Selain itu, pemberian insentif fiskal, seperti pengurangan pajak atau subsidi untuk proses sertifikasi halal, dapat mendorong UMKM meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Dalam konteks regulasi, perlu dilakukan simplifikasi dan harmonisasi tata kelola sertifikasi halal agar prosesnya lebih cepat, transparan, dan efisien. Koordinasi yang baik antara BPJPH, MUI, dan kementerian terkait menjadi kunci agar kebijakan berjalan efektif serta mengurangi beban administratif bagi pelaku UMKM.<sup>41</sup>

b) Kebijakan Pengembangan Inovasi, Digitalisasi, dan Kemitraan Ekosistem Halal

Daya saing UMKM halal di era liberalisasi tidak hanya ditentukan oleh harga dan kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital. Oleh karena itu, kebijakan publik perlu mendukung pembangunan halal innovation hub sebagai pusat inovasi, riset, dan pelatihan yang menghubungkan UMKM dengan dunia industri, akademisi, dan pemerintah. Program literasi digital, pelatihan e-commerce halal, serta fasilitasi partisipasi dalam platform perdagangan internasional dapat membantu UMKM memperluas jangkauan pasarnya. Lebih jauh, kebijakan kolaboratif yang menghubungkan UMKM dengan industri besar (link and match) dapat menciptakan rantai pasok halal yang kuat, efisien, dan berkelanjutan.<sup>42</sup>

c) Kebijakan Pemberdayaan Sosial, Nilai Lokal, dan Etika Syariah

Resiliensi sejati UMKM halal tidak hanya bersumber dari modal ekonomi, melainkan juga dari ketahanan sosial dan moral masyarakat. Kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada pendidikan kewirausahaan berbasis nilai Islam, pelestarian kearifan lokal, serta penguatan komunitas usaha halal. Pendekatan berbasis komunitas akan menumbuhkan solidaritas ekonomi, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, kebijakan yang mendorong

<sup>41</sup> Achmad Donny and Badrudin Kurniawan, 'Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasca Covid-19', *Publika*, 8 April 2023, 1970, <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1965-1982>.

<sup>42</sup> Yeni Rohaeni and Ahmad Hidayat Sutawijaya, 'Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia', *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri* 15, no. 3 (2020): 183.

pengembangan sumber daya manusia (SDM) halal, termasuk pelatihan sertifikasi halal internal dan manajemen rantai pasok syariah, menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem yang tangguh.<sup>43</sup>

Secara keseluruhan, kebijakan yang mendukung resiliensi UMKM halal harus bersifat inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap perubahan global. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi yang berkesinambungan agar liberalisasi ekonomi tidak menjadi ancaman, melainkan menjadi momentum untuk meneguhkan peran UMKM halal sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang beretika, tangguh, dan berdaya saing.

## KESIMPULAN

Liberalisasi ekonomi global telah membuka peluang besar bagi pengembangan UMKM halal Indonesia untuk menembus pasar internasional yang bernilai triliunan dolar. Namun, di sisi lain, keterbukaan tersebut juga menghadirkan tantangan yang kompleks, mulai dari biaya sertifikasi halal yang tinggi, rendahnya literasi halal, lemahnya rantai pasok, keterbatasan akses pembiayaan syariah, hingga fragmentasi regulasi antar lembaga. Berbagai hambatan tersebut menjadikan banyak UMKM halal belum sepenuhnya siap bersaing dalam pasar global yang menuntut efisiensi, inovasi, dan kepatuhan terhadap standar internasional.

Meskipun demikian, pelaku UMKM halal menunjukkan kapasitas adaptasi yang kuat melalui transformasi digital, inovasi produk, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi strategis dengan berbagai pihak. Digitalisasi menjadi katalis penting dalam memperluas pasar dan memperkuat branding halal, sementara inovasi produk berbasis nilai kehalalan dan keberlanjutan membuka peluang baru di pasar domestik maupun global. Pelatihan dan sertifikasi halal turut memperkuat profesionalisme pelaku usaha dan memastikan konsistensi kehalalan produk, sedangkan kemitraan dengan lembaga keuangan syariah dan industri besar mendorong efisiensi rantai pasok halal.

Sertifikasi halal sendiri terbukti memiliki peran sentral dalam memperkuat resiliensi UMKM. Sertifikat halal tidak hanya menjadi simbol kepatuhan religius, tetapi juga instrumen ekonomi yang meningkatkan kepercayaan konsumen, efisiensi manajemen produksi, serta akses terhadap pasar global. Melalui penerapan sistem jaminan halal (HAS), pelaku UMKM mampu menata proses produksi secara lebih terstandar, efisien, dan transparan. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi fondasi strategis bagi ketahanan usaha, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan persaingan internasional.

Resiliensi UMKM halal ditentukan oleh kombinasi faktor ekonomi, manajerial, sosial, spiritual, dan kebijakan publik. Akses pembiayaan syariah, kemampuan inovasi, kekuatan jaringan sosial, serta nilai-nilai etika Islam menjadi pilar yang saling memperkuat dalam menghadapi tekanan liberalisasi ekonomi. Pemerintah memiliki peran kunci dalam memperkuat ekosistem halal melalui kebijakan inklusif yang memperluas akses modal, menyederhanakan regulasi, mendukung digitalisasi, dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kolaborasi antar lembaga, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha, UMKM halal Indonesia berpotensi menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan, keberlanjutan, dan spiritualitas Islam. Oleh karena itu, keberhasilan menghadapi liberalisasi ekonomi bukan sekadar soal daya saing, tetapi juga kemampuan kolektif bangsa dalam menjadikan ekonomi halal sebagai pilar kemandirian dan ketahanan ekonomi yang berkeadaban.

<sup>43</sup> Ade Marpudin et al., *MANAJEMEN HALAL (Pendekatan Teoretis, Praktik, Dan Empiris)*, ed. Zanariyah Umi, with Ade Marpudin et al. (2025), 90–93, <https://penerbitlitnus.co.id/portfolio/manajemen-halal-pendekatan-teoritis-praktik-dan-empiris/>.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mahasiswa yang beranggotakan Rodiatul Mafila, M.Zarkasi Rohim, Dicky Aryansyah, Dewi Faikhotul Thohiro, Muhammad Faqih Jazilar Rohman yang terlihat langsung dalam penelitian maupun kepada Dosen Pegampu Mata Kuliah Ekonomi Internasional Ibu Putri Catur Ayu Lestari, S.EI., M.M. Yang telah membantu dalam memilih judul dalam jurnal yang ingin diteliti. Demikian kami sampaikan terimakasih.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Nur Laila, and Achmad Fageh. Resiliensi Ekonomi Syariah Di Indonesia Dalam Menggagas Sistem Tangguh Di Masa Depan. 2025. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/download/13741/4309>
- .Ali, Jeihan Azhar, Galuh Tri Pambekti, Hilmy Baroroh, Egha Ezhar Junaeka Putra Hassany, and Defi Insani Saibil. 'RESILIENSI EKONOMI PESANTREN MELALUI HOLDING BISNIS HEBITREN: APLIKASI ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT'. DEVOSI 5, no. 2 (2024): 130–51.
- Azzahra, F. (2024). Manajemen Adaptif dan Peningkatan Daya Saing UMKM Halal. Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara, 10(3), 91–107.
- BPJPH. (2023). Laporan Tahunan Sertifikasi Halal Nasional. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- BPJPH. (2025). Laporan Tahunan Sertifikasi Halal Nasional 2025. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- BPJPH. (2025). Laporan Program SEHATI dan Dampaknya terhadap Daya Saing UMKM Halal. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- BPJPH Kementerian Agama. (2022). Laporan Tahunan Sertifikasi Halal dan Ekspor Produk Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- DinarStandard. (2024). State of the Global Islamic Economy Report 2024. Dubai: DinarStandard.
- Donny, Achmad, and Badrudin Kurniawan. 'Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasca Covid-19'. Publika, 8 April 2023, 1965–82. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1965-1982>
- .Fauziah, N., & Ananda, R. (2023). Cluster-Based Halal Industry Development and Its Impact on SMEs' Growth. Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer, 7(3), 75–92.
- Ferrinadewi, Erna, and Maria Caroline. 'RESILIENSIS UMKM MAKANAN DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA SURABAYA'. Jurnal Nusantara Sosial Sains 1, no. 2 (2025): 7–14. <https://doi.org/10.64020/jnss.v1i2.13>
- .Harahap, F. (2023). UMKM Halal dan Tantangan Daya Saing di Era Liberalisasi Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 12(2).
- Hasan, M., & Putri, E. (2023). Quadruple Helix Collaboration Model in Halal Ecosystem Development. Jurnal Inovasi Ekonomi Islam, 5(1), 72–88.
- Ismail, H., & Fadillah, N. (2023). Digital Transformation of Halal SMEs in Indonesia: Challenges and Opportunities. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 11(1), 23–40.
- Kamaruddin, N., Yusuf, M., & Rahman, H. (2022). Challenges of Halal Supply Chain Implementation among SMEs. International Journal of Halal Studies, 3(2), 55–70.
- KNEKS. (2023). Laporan Ekosistem Industri Halal Nasional. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah). (2024). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2024–2029. Jakarta: KNEKS.

- Kurniawati, R., & Hidayat, A. (2022). Financial Challenges of Halal SMEs in the Liberal Economy Era. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 9(2), 110–127.
- Kusnadi, T. (2024). Analisis Efisiensi dan Traceability Rantai Pasok Halal UMKM Indonesia. *Jurnal Logistik dan Bisnis Halal*, 5(1).
- LPPOM MUI. (2023). *Pedoman Sistem Jaminan Halal (SJH) Edisi 2023*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Larasati, Endar, Deva Elisia, Yusuf Al Afghani, and Muhammad Azam Muttaqin. 'RESILIENSI DESA BERKEMAJUAN MELALUI OPTIMALISASI SOSIAL MEDIA DALAM MEMPUBLIKASIKAN POTENSI DESA KUPUK, KECAMATAN BUNGKAL KABUPATEN PONOROGO VILLAGE RESILIENCE PROGRESSING THROUGH SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION IN PUBLICING THE POTENTIAL OF KUPUK VILLAGE, BU'. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 05 (2023): 1075–85.
- Lubis, A., & Hasanah, D. (2023). Inovasi Manajerial dan Ketahanan UMKM Halal di Era Digital. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 8(1), 67–84.
- Lubis, F., & Nurdin, Z. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Peluang Ekspor UMKM Pangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Indonesia*, 5(3).
- Marpudin, Ade, Sembodo Eko, and Gunawan Tri. *MANAJEMEN HALAL (Pendekatan Teoretis, Praktik, Dan Empiris)*. Edited by Zanariyah Umi. With Ade Marpudin, Sembodo Eko, Gunawan Tri, and Zanariyah Umi. 2025. <https://penerbitlitnus.co.id/portfolio/manajemen-halal-pendekatan-teoritis-praktik-dan-empiris/>
- Mulyani, F., & Fatimah, L. (2024). Digitalisasi dan Daya Saing UMKM Halal di Era Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 8(1), 101–118.
- Nasution, R., Hidayat, A., & Lestari, S. (2022). Literasi Halal dan Kesiapan UMKM Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 10(1).
- Nugroho, A., & Fatimah, N. (2024). Halal Certification as Competitive Advantage for SMEs. *Asian Journal of Business and Management*, 12(2).
- Nursanti, E., & Putra, D. (2022). Inovasi Produk Halal dan Preferensi Konsumen di Era Modernisasi Pasar. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah*, 8(2), 99–114.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). *Laporan Keuangan Syariah Indonesia 2024: Perkembangan Pembiayaan UMKM*. Jakarta: OJK.
- Rahman, F., et al. (2022). Efektivitas Sistem Jaminan Halal terhadap Efisiensi Produksi UMKM. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Halal*, 6(1).
- Rahman, M., & Yusuf, N. (2023). Halal Branding Strategy: The Case of Wardah Cosmetics in Indonesia. *Asian Journal of Islamic Marketing*, 4(1), 55–72.
- Rahman, T., & Sari, N. (2023). Integrating Islamic Ethics and Business Resilience in Halal SMEs. *Asian Journal of Islamic Management*, 4(2), 100–117.
- Rahmawati, S., & Fathoni, M. (2021). Analisis Hambatan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(3).
- Rahmawati, S., & Huda, M. (2022). Peran Sertifikasi Halal terhadap Kepercayaan Konsumen Produk UMKM Pangan. *Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, 8(2).
- Setiawan, R., & Hamid, Z. (2024). Pelatihan Halal dan Penguatan Kompetensi UMKM di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(1), 44–59.
- Wahyudi, H. (2025). Pembiayaan Syariah dan Resiliensi UMKM Halal di Indonesia. *Jurnal Keuangan Islam Indonesia*, 12(1), 65–79.

- Yusuf, R. (2022). Nilai Spiritual dan Ketenangan Pelaku Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Psikologi Islam dan Bisnis*, 6(1), 55–71.
- Yusuf, S. (2022). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pembiayaan UMKM Halal. *Jurnal Keuangan Islam dan Bisnis*, 10(1), 88–104.
- Zahra, N., & Fitria, L. (2024). The Role of Social Capital in Enhancing Halal SMEs Resilience. *Indonesian Journal of Halal Industry*, 3(2), 45–60.
- Ulya, Widadatul, Arinda Sekar Kinasih, Yanuar Fatma Rizkiyani, Anggun Lintang Sedy Cahyani, and Nofalia Widiyanti. 'Upaya Peningkatan Resiliensi Dan Literasi UMK Melalui Fasilitasi Pembuatan Sertifikat Halal Di Desa Karangbanjar'. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 162–69. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v5i1.400>